

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Di Indonesia, selain terdapat standar akuntansi keuangan (SAK) juga terdapat standar akuntansi pemerintah (SAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum (Halim, 2014). Selanjutnya menurut Nordiawan (2010) penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Bastian (2010) mengemukakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

Persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, “standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64/2013 “SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran”. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.1.2 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Menurut SAP

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP nomor 71/2010 yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pada masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

- d. *Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)*
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. *Periodisitas (Periodicity)*
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
- f. *Konsistensi (Consistency)*
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- g. *Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)*
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
- h. *Penyajian Wajar (Fair Presentation)*
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.2 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik sektor ekonomi, sosial, dan politik (Mahsun, 2011). Permendagri nomor 64/2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Erlina dkk (2013) mengemukakan pengertian sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Selanjutnya Halim dkk (2010) menjelaskan bahwa “sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi aset”. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri nomor 59/2007). Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berdasarkan Permendagri nomor 16/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59/2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

berkaitan dengan penerimaan kas pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD). Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- b. **Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**
Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/ atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.
- c. **Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah**
Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.
- d. **Prosedur Akuntansi Selain Kas**
Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP nomor 71/2010). Laporan keuangan adalah suatu daftar finansial entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (Permadi, 2013). Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta penjelasan dari bagian integral laporan keuangan (IAI, 2017).

Mahsun (2011) menyebutkan pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

laporan keuangan daerah adalah hasil dari proses akuntansi keuangan daerah yang berisi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2017) dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan terdiri :

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan PP nomor 71/2010 pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber dan keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber daya keuangan/ekonomi, *transfer*, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional (LO). Selain itu laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.3.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP nomor 71/2010 tentang SAP berbasis akrual komponen-komponen laporan keuangan dalam SAP adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
LPSAL merupakan salah satu laporan yang sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan pokok pemerintah menurut SAP berbasis kas menuju akrual. Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) / sisa kurang penggunaan anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan perubahas ekuitas merupakan laporan yang menghubungkan antara LO dengan neraca, sehingga penyusunan LO, LPE, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

2.3.3 Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP nomor 71/2010). Menurut Harefa (2014) mengemukakan bahwa kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Sementara itu menurut Erlina dan Rasdianto (2015) ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni:

a. Relevan (*relevance*)

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan meliputi:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu (*timeliness*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.

4. Lengkap (*complete*)

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

b. Andal (*reliable*)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur (*representational faithfulness*)
Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 2. Dapat diverifikasi (*verifiability*)
Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
 3. Netralitas (*neutral*)
Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Dapat dibandingkan (*comparable*)
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
- d. Dapat dipahami (*understandable*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.4 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Botutihe (2013)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota gorontalo.	X: penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Y: kualitas laporan keuangan pemerintah	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan.
2.	Harefa (2016)	Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.	X: Kistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan Y: Kualitas laporan keuangan	SAKD dan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Ihsanti (2014)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Terhadap kualitas laporan keuangan daerah	X: kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah Y: Kualitas laporan keuangan daerah	Kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4.	Kusuma (2012)	Pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.	X: Standar akuntansi pemerintah Y: Kualitas laporan keuangan	Standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Lasoma (2013)	Pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	X: Standar akuntansi pemerintah Y: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif.
6.	Ningtyas (2014)	Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	X: Efektivitas penerapan SAP Y: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7.	Permadi (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan daerah	X: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Y: Kualitas laporan keuangan daerah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Daerah.
8.	Rahayu dkk (2014)	Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAKD, dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	X: kompetensi SDM, penerapan SAKD, dan SAP Y: Kualitas laporan keuangan daerah	Hasil penelitian ini menyatakan Bahwa SDM, SAKD, dan SAP Berpengaruh positif terhadap Kualitas.
9.	Wati dkk (2014)	Pengaruh kompetensi sdm, penerapan sap, dan sistem Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan Keuangan daerah	X: Kompetensi sdm, penerapan sap, dan sakd Y: Kualitas laporan keuangan daerah	Hasil penelitian ini menyatakan Bahwa SDM, SAP, dan SAP Berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan.

Sumber: Data yang diolah, 2017.

2.5 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010). Mahmudi (2011) mengemukakan bahwa standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Sementara menurut Nordiawan (2009) mengemukakan penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. SAP digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan (Darise, 2008).

Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lasoma (2013) yang menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif. Selain itu, dilakukan oleh Kusuma (2012) dengan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Selain itu, penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu dilakukan Adhi dan Soehadjo (2013) dalam Rahayu dkk (2014) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah sangat berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

2.6 Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2010). Sementara itu Bastian (2007) berpendapat bahwa, jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. SAKD yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Mahmudi, 2010). Sedangkan menurut Harefa (2014) sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan teori-teori penghubung tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Botutihe (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan, karena responden yang digunakan dalam penelitian belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pembuatan laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk (2014) yang menyatakan bahwa SAKD sangat berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

2.7 Hubungan Penerapan SAP dan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

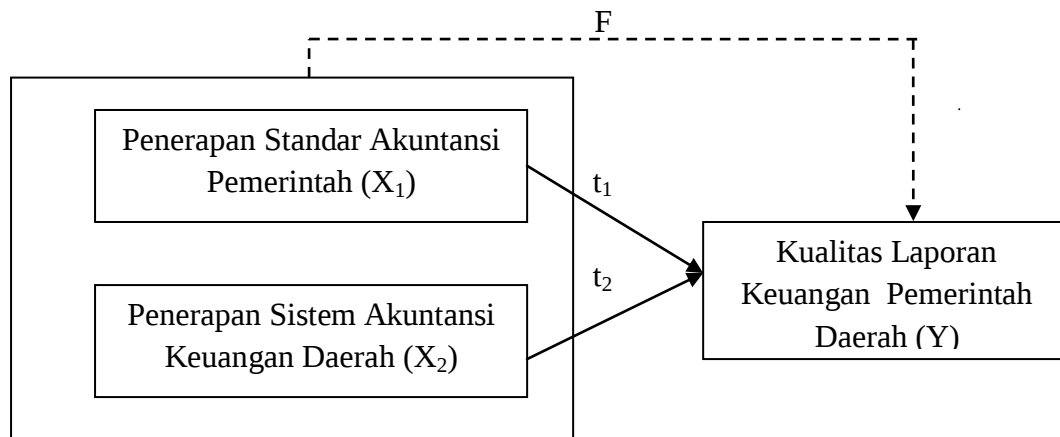
Penerapan SAP dan SAKD adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan SAP dan SAKD. Dengan adanya penerapan SAP yang baik dan didukung oleh pemahaman SAKD, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan para pengambil keputusan. Laporan keuangan yang andal apabila laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan tidak terjadi kesalahan yang menyesatkan. Laporan keuangan dapat dipahami apabila menggunakan istilah yang dapat dipahami oleh penggunanya. Serta laporan keuangan dikatakan dapat dibandingkan apabila laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan entitas lain (Wati dkk, 2014).

Berbagai penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersamaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya dilakukan oleh Rahayu dkk (2014) yang menunjukkan bahwa penerapan SAP dan SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu, Wati dkk (2014) juga membuktikan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

2.8 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.8.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



Sumber: Data yang diolah, 2017.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

-----► : Uji Signifikansi Simultan (F)

————► : Uji Signifikansi Parsial (t)

Berdasarkan gambar di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu penerapan SAP dan SAKD mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen pada BPKAD provinsi Sumatera Selatan.

2.8.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H2 : Terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H3 : Terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.